

**ANALISIS PENGARUH BELANJA PEMERINTAH
DAERAH TERHADAP
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
(STUDI PADA KABUPATEN/KOTA DI PULAU JAWA
TAHUN 2007-2013)**

JURNAL ILMIAH

Disusun oleh :

**Anugrah Priambodo
115020100111044**



**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2015**

LEMBAR PENGESAHAN PENULISAN ARTIKEL JURNAL

Artikel Jurnal dengan judul :

**ANALISIS PENGARUH BELANJA PEMERINTAH DAERAH
TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
(STUDI PADA KABUPATEN/KOTA DI PULAU JAWA TAHUN 2007-
2013)**

Yang disusun oleh :

Nama : Anugrah Priambodo
NIM : 115020100111044
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : S1 Ilmu Ekonomi

Bahwa artikel Jurnal tersebut dibuat sebagai *persyaratan ujian skripsi* yang dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 12 Juni 2015.

Malang, 12 Juni 2015

Dosen Pembimbing,



Dr. Iswan Noor, SE., ME.

NIP. 19590710 1983303 1 004

**Analisis Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah
Terhadap Indeks Pembangunan Manusia
(Studi pada Kabupaten/Kota di Pulau Jawa Tahun 2007-2013)**

Anugrah Priambodo

Dr. Iswan Noor, SE., ME.

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

Email: anugrahpriambodo@gmail.com

ABSTRAK

Pencapaian kesejahteraan masyarakat dapat dihitung salah satunya dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM yang diraih oleh kabupaten/kota di Pulau Jawa memiliki perkembangan dari tahun ke tahun, selain itu belanja pemerintah daerah dan pertumbuhan ekonomi juga memiliki tren yang cenderung meningkat. Secara teori tingkat belanja pemerintah dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah akan mempengaruhi kesejahteraan suatu daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh realisasi belanja daerah dan pertumbuhan ekonomi terhadap IPM kabupaten dan kota di Pulau Jawa Tahun 2007 sampai dengan 2013. Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 110 kabupaten/kota di Pulau Jawa, sedangkan variabel independen yang digunakan adalah belanja daerah, belanja modal, belanja pegawai, dan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, metode analisis data yang digunakan adalah data panel dengan pendekatan Fixed Effect Model (FEM). Hasil estimasi penelitian menunjukkan bahwa belanja daerah, belanja pegawai, belanja modal, dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Kata kunci:

Indeks Pembangunan Manusia, Kesejahteraan, Belanja Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Modal, Belanja Pegawai

A. PENDAHULUAN

Tujuan akhir dari suatu pembangunan nasional adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur serta menciptakan kesejahteraan umum seperti yang disebutkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berbagai macam teori dan kebijakan yang diaplikasikan oleh pemerintah dalam rangka untuk mengusahakan tercapainya tujuan bersama, diterjemahkan melalui kesejahteraan masyarakat yang dapat dicapai melalui pembangunan.

Pembangunan manusia, menurut definisi UNDP, merupakan suatu proses perluasan bagi penduduk untuk membangun hidupnya yang dianggap berharga. Diantara pilihan-pilihan dalam pembangunan manusia, terdapat beberapa hal pokok, yaitu supaya manusia dapat merasakan kehidupan yang panjang dan sehat, berpengetahuan, dan mempunyai akses terhadap sumber-sumber yang diperlukan untuk berkehidupan layak. Modal manusia (*human capital*) merupakan salah satu faktor penting dalam proses pertumbuhan ekonomi (Brata, 2004 dalam Dewi & Sutrisna, 2014). Hal tersebut mengindikasikan pentingnya pembangunan manusia yang berkualitas, yang akan menunjang kemajuan bidang-bidang yang lain. Kemudian menurut Todaro & Smith (2006), besar-kecilnya potensi pertumbuhan ekonomi suatu negara sangat dipengaruhi oleh kuantitas maupun kualitas dari sumber daya yang dimilikinya, baik berupa sumber daya fisik maupun sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang dimaksud dapat berupa jumlah penduduk dan keterampilannya, serta tingkat pendidikan.

Dalam penelitiannya, Cholili (2014) menemukan bahwa IPM mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia. Menurunnya kemiskinan saat IPM meningkat merupakan indikasi tingginya kualitas sumberdaya manusia yang akan berakibat pada meningkatnya produktifitas kerja masyarakat yang akan meningkatkan pendapatan, yang pada akhirnya masyarakat akan mampu memenuhi kebutuhan hidup atau dengan kata lain kesejahteraan masyarakat meningkat. Hal ini memperkuat argumen bahwa IPM merupakan alat yang dapat mengukur kesejahteraan.

Sejak tahun 2007 sampai tahun 2013, Indeks Pembangunan Manusia pada pulau-pulau di Indonesia terus mengalami peningkatan. Hal tersebut juga menunjukkan kesejahteraan masyarakat telah meningkat setiap tahunnya, dengan Pulau Jawa sebagai wilayah memiliki rata-rata nilai IPM paling tinggi di Indonesia. Kemudian, Pulau Jawa juga merupakan penyumbang terbesar komponen Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Pada tahun 2013 Jawa menyumbang 57,66% PDB Indonesia, jumlah ini jauh mengungguli kepulauan lain seperti Sumatera dengan peranan sebesar 22,72%. Hal ini tentunya menjadi indikasi bahwa wilayah Jawa merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Selain itu, pada tahun 2010, presentase jumlah penduduk Indonesia mencapai 57,44% dari total penduduk Indonesia. Terlebih, luas wilayah Pulau Jawa tidaklah sebesar kepulauan besar lainnya seperti Sumatera, Kalimantan, ataupun Papua. Hal ini tentunya membuat kepadatan penduduk di Jawa merupakan yang paling tinggi di Indonesia. Masalah ini membuat Pulau Jawa menjadi menarik untuk dikaji perihal kesejahteraan penduduknya.

Disisi lain, Kegiatan pembangunan nasional membutuhkan peran penting dari masyarakat maupun pemerintah dalam memanfaatkan sumber daya potensial yang tersedia di masing-masing daerah, sehingga dapat tercipta pembangunan yang lebih merata. Oleh karena itu, muncul kebijakan otonomi daerah pada tahun 2001 yang tertuang dalam UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian direvisi dengan UU No. 32 Tahun 2004, dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang kemudian direvisi dengan UU No. 33 Tahun 2004. Dengan kebijakan otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki wewenang untuk menciptakan pendapatan daerahnya serta melakukan alokasi untuk prioritas pembangunan di daerahnya secara mandiri dan diharapkan dapat lebih pemeratakan pembangunan sesuai dengan potensi dan aspirasi lokal untuk mengembangkan wilayah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat diharapkan juga turut berperan menjadi subjek pembangunan, bukan hanya menjadi objek pembangunan, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan suatu daerah dan juga kemajuan nasional.

Dalam pembangunan ekonomi daerah, proses majunya pertumbuhan pertumbuhan suatu daerah sering ditunjukkan dengan tingkat pertambahan PDRB dan APBD. Pembangunan daerah dengan APBD merupakan salah satu bentuk campur tangan pemerintah daerah dalam memajukan daerahnya. Maryani (2010) menjelaskan bahwa pemerintah menggunakan APBD untuk membiayai pembangunan di sektor-sektor terkait pembangunan manusia. Lebih spesifiknya pemerintah daerah harus bisa mengalokasikan belanja daerah melalui pengeluaran pembangunan di sektor-sektor pendukung untuk meningkatkan IPM.

Pada skala nasional, besaran nilai APBN, baik pendapatan negara dan hibah, serta belanja negara memiliki tren yang meningkat setiap tahunnya. Kenaikan anggaran tersebut merupakan indikator tumbuhnya perekonomian Indonesia secara garis besar. Peningkatan anggaran pemerintah tidak hanya terjadi pada pemerintah pusat melalui APBN-nya, namun juga pada pemerintah daerah melalui APBD-nya. Kenaikan anggaran pada APBD tingkat kabupaten di Indonesia bukan hanya menjadi indikator kemajuan perekonomian daerah, namun juga indikator bahwa kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal sudah semakin baik diterapkan oleh daerah-daerah di Indonesia, khususnya Pulau Jawa. Dengan diikuti kenaikan anggaran publik seperti belanja modal, diharapkan pembangunan yang terjadi di daerah, baik pembangunan manusia maupun pembangunan perekonomian dapat meningkat.

Selain anggaran untuk sektor publik seperti kesehatan dan pendidikan, anggaran pengeluaran daerah berupa belanja modal dan belanja pegawai dapat pula berpengaruh terhadap pembangunan manusia. Belanja pegawai dianggap dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Daya beli aparatur daerah yang termasuk tinggi memberikan *multiplier effect* terhadap masyarakat di sekitarnya, yang kemudian mempercepat perputaran perekonomian masyarakat. Hal yang serupa terjadi juga dengan belanja modal. Belanja modal berupa dana infrastruktur dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan, jembatan, sarana transportasi membuat aktivitas perekonomian masyarakat semakin lancar, yang secara tidak langsung meningkatkan kesempatan masyarakat untuk mencapai taraf hidup layak. Peningkatan yang terjadi pada salah satu faktor pembentuk IPM diatas tentunya akan meningkatkan pencapaian IPM daerah tersebut.

Pemerintah sebagai lembaga eksekutif memiliki peran untuk menentukan kemana arah pembangunan akan dijalankan. Pembangunan yang saat ini mengusung *people-centered development* dimana manusia (rakyat) merupakan tujuan utama dari pembangunan, kehendak dan kapasitas manusia merupakan sumberdaya yang sangat penting (Kuncoro, 1997). Maka dari itu,

pemerintah dinilai memiliki peran untuk membuat subsektor IPM seperti tingkat harapan hidup, pengetahuan, dan standar hidup layak yang dapat dicapai melalui kesehatan, pendidikan, dan pendapatan yang memadai bagi masyarakat.

Barbagai langkah dan kebijakan sejatinya telah mengarah kepada usaha pencapaian tiga subsektor tersebut, baik kesehatan, pendidikan, maupun berkehidupan layak. Dari sektor kesehatan, pemerintah telah menyediakan sarana kesehatan, dari Puskesmas yang telah menjangkau tingkat administratif daerah terkecil, penyediaan rumah sakit umum milik pemerintah, maupun kebijakan asuransi kesehatan yang kini mulai digencarkan kepada seluruh masyarakat. Dari sektor pendidikan banyak kebijakan yang telah diambil, seperti dana bantuan yang disebut dana BOS, penyediaan infrastruktur sekolah dan guru yang memadai. Kemudian untuk sektor kehidupan layak, peran pemerintah lebih kepada kebijakan penyediaan lapangan pekerjaan, seperti dengan adanya Kredit Usaha Mikro dan pelatihan profesi agar lebih memiliki keahlian dalam bidang pekerjaan.

Pembangunan manusia merupakan hal yang penting bagi negara berkembang seperti Indonesia. Dengan tercapainya pembangunan manusia yang berkualitas dan dibarengi perekonomian yang mantap, maka kesejahteraan yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat akan dapat tercapai. Dari uraian diatas menjadi penting untuk mengetahui seberapa besar dampak belanja daerah dan subsektor-nya terhadap pencapaian IPM pada wilayah-wilayah di Pulau Jawa. Berdasarkan latar belakang yang disajikan diatas, maka yang akan menjadi fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh realisasi belanja pemerintah daerah, belanja modal, dan belanja pegawai terhadap indeks pembangunan manusia pada kabupaten/kota di Pulau Jawa?
2. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia pada kabupaten/kota di Pulau Jawa?

B. KAJIAN PUSTAKA

Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indeks komposit yang mengukur pencapaian pada tiga bidang sosio-ekonomi yang mengacu pada hasil pembangunan manusia, diantaranya bidang kesehatan yang diukur dengan tingkat harapan hidup, bidang pengetahuan/pendidikan diukur dengan tingkat kemampuan baca tulis orang dewasa dan rata-rata lama sekolah, dan bidang kemampuan daya beli (standar hidup layak) yang diukur dengan GDP per kapita *purchasing power parity* (Grimm *et al*, 2008).

Data Indeks Pembangunan Manusia yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dari Badan Pusat Statistik (BPS). Persamaan perhitungan Indeks Pembangunan Manusia dapat ditulis sebagai berikut:

$$HDI = \frac{1}{3}LI + \frac{1}{3}KI + \frac{1}{3}PI$$

Keterangan:

HDI : Indeks Pembangunan Manusia

LI : indeks harapan hidup

PI : indeks konsumsi riil per kapita yang disesuaikan

KI : indeks pengetahuan; untuk mendapatkan indeks pengetahuan terdapat persamaan:

$$KI = \frac{2}{3}li + \frac{1}{3}si$$

li : indeks melek huruf orang dewasa (>15 tahun)

si : indeks rata-rata lama sekolah

Hukum Adolf Wagner

Adolf Wagner dalam bukunya *Algemeine Oder Theoritische Volkswirtschaftslehre* menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dan kegiatan pemerintah semakin lama semakin meningkat. Pemikiran ini disebut dengan hukum selalu meningkatnya peranan pemerintah (*Gesetz Des Wachsendenstaats Und Bedarf*). Inti dari teori ini adalah semakin meningkatnya peran pemerintah dalam kegiatan dan kehidupan ekonomi masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Wagner menyatakan bahwa dalam suatu perekonomian apabila pendapatan per kapita meningkat maka secara relatif, maka pengeluaran pemerintah pun akan meningkat terutama disebabkan

karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi, kebudayaan, dan sebagainya.

Adolf Wagner dalam Soepangat & Haposan (1991) menyebutkan bahwa yang semakin meningkat tersebut adalah kegiatan dan kebutuhan negara yang mempunyai kaitan dengan tugas dan fungsi pemerintah, penggunaan sumber daya ekonomi oleh pemerintah termasuk pengeluaran pemerintah. Terdapat beberapa penyebab semakin meningkatnya pengeluaran pemerintah, yakni meningkatnya fungsi pertahanan keamanan dan ketertiban, meningkatnya fungsi kesejahteraan, meningkatnya fungsi perbankan, dan meningkatnya fungsi pembangunan (Prasetya, 2012). Hukum Wagner dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$\frac{PPkP}{PPK1} < \frac{PPkPn}{PPK2} < \dots < \frac{PPkPn}{PPKn}$$

PPkP : Pengeluaran pemerintah per kapita

PPK : Pendapatan per kapita, yaitu GDP/jumlah penduduk

1, 2, ... n : jangka waktu (tahun)

Teori Wagner mendasarkan pandangannya pada suatu teori yang disebut *organic theory of state* yaitu teori organis yang menganggap pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak terlepas dengan masyarakat lain.

Namun apakah peningkatan pengeluaran negara tersebut bersifat relatif atau bersifat absolut oleh R.A. Musgrave dinyatakan bahwa hal tersebut gagal dijelaskan oleh Adolf Wagner. Musgrave beranggapan bahwa yang dimaksudkan Wagner adalah dalam arti relatif. Relatif dalam arti dinyatakan dengan presentase dari GNP dan atau dibandingkan dengan sektor swasta. Selain itu menurut Peacock dan Wiseman, Wagner selalu menekankan dalam waktu yang panjang atau *a long term trend of public economic activity* sehingga kurang memperhatikan pola waktu atau proses perkembangan pengeluaran negara tersebut.

Teori Peacock-Wiseman

Teori Alan T. Peacock dan Jack Wiseman didasarkan pada suatu analisis penerimaan pengeluaran pemerintah. Pemerintah selalu berusaha memperbesar pengeluarannya dengan mengandalkan memperbesar penerimaan dari pajak, padahal masyarakat tidak menyukai pembayaran pajak yang besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut. Meningkatnya pengeluaran pajak mengakibatkan pengeluaran pemerintah juga meningkat. Dalam keadaan normal meningkatnya GNP menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar (Prasetya, 2012).

Pada hakikatnya Peacock dan Wiseman melakukan penyempurnaan terhadap hukum atau hipotesis dari Adolf Wagner. Berdasarkan hasil empiris penyelidikan Alan T. Peacock dan Jack Wiseman menekankan pada pola waktu, didapatkan bahwa perkembangan pengeluaran pemerintah bukan bersifat *continous growth*, melainkan seperti tangga rumah, yang istilahnya adalah *steplike*. Mengapa pengeluaran dan penerimaan pemerintah berkembang seperti tangga rumah tersebut, dikarenakan tiga efek yang saling berhubungan meskipun dapat dipisahkan, yaitu *displacement effect*, *inspection effect*, dan *concentration effect*. Kenaikan yang bersifat menanjak disebabkan karena guncangan-guncangan sosial yang besar seperti perang dan depresi. Gangguan tersebut menimbulkan *displacement effect* yang berupa kenaikan pengeluaran dan pajak secara mutlak (Soepangat & Haposan, 1991).

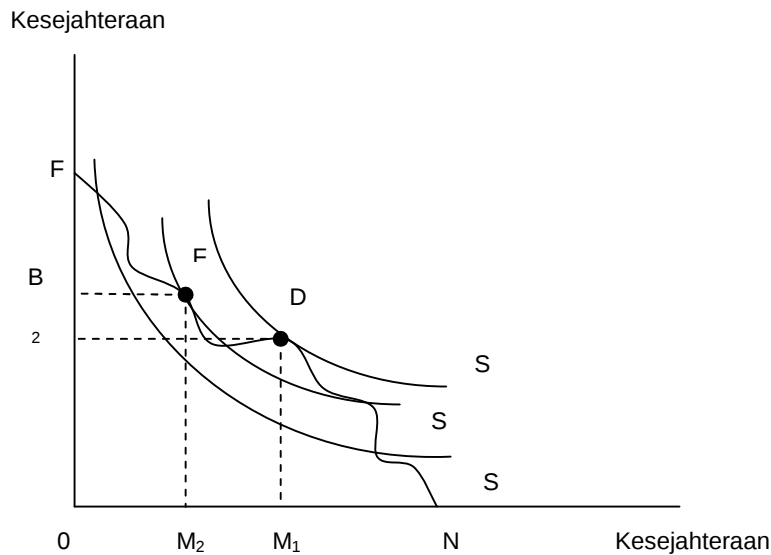
Teori Samuelson

Samuelson menyempurnakan teori pengeluaran pemerintah dengan sekaligus menyertakan barang sektor swasta. Samuelson menyatakan bahwa adanya barang publik yang mempunyai dua karakteristik, yaitu *non-exclusionary* dan *non-rivalry*. Hal ini bukan berarti tidak bisa mencapai kondisi *Pareto Optimal* atau tingkat kesejahteraan masyarakat yang optimal. Non eksklusif (*non-exclusionary*) sendiri adalah manfaat dari barang publik mencakup konsumsi eksternalitas yang tidak dapat dipilah-pilah menurut tiap orang. Sedangkan non rival (*non-rivalry*) adalah barang dimana manfaatnya dapat diberikan bagi pengguna tambahan dengan biaya marjinal nol dan barang publik umumnya memerlukan tindakan kolektif bagi pengadaannya.

Diagram teori Samuelson menjelaskan konsumsi antara barang swasta dan barang publik antara dua individu dengan kurva indifferen R dan S. Dengan titik D sebagai keadaan awal, maka penurunan kesejahteraan R (dari M₁ ke M₂) menyebabkan kesejahteraan S naik dari B₁ ke B₂. Kemudian untuk mengetahui perbaikan atau penurunan kesejahteraan masyarakat, maka

diperlukan kurva kesejahteraan masyarakat yaitu S_1 , S_2 , dan S_3 . Maka dari itu, kesejahteraan tertinggi yang dapat dicapai adalah pada titik D.

Gambar 1: **Kesejahteraan Optimal Teori Samuelson**



Sumber: Teori Barang Publik, 2012, diolah

Hubungan Pengeluaran Pemerintah dengan Pembangunan Manusia

Pengeluaran pemerintah untuk pembangunan manusia yang diwujudkan melalui peningkatan daya beli akan mendorong kenaikan permintaan produk kebutuhan rumah tangga lokal secara menyeluruh. Meningkatnya permintaan barang produksi lokal akan memberikan rangsangan yang besar kepada produsen lokal, memperbesar kesempatan kerja, dan menumbuhkan investasi.

Kemudian, diantara struktur belanja APBD, belanja modal merupakan output yang paling dapat mempengaruhi pembangunan khususnya pembangunan manusia. Belanja modal yang memiliki sifat berupa aset tetap dan bermanfaat jangka panjang menjadikan belanja modal sebagai modal atau pondasi untuk meningkatkan pembangunan dalam sektor kesehatan, pendidikan, dan kemampuan daya beli masyarakat karena manfaatnya yang dapat mempercepat akses hubungan antar pelaku ekonomi sehingga biaya transaksi dapat diminimalkan. Selain akan meningkatkan perekonomian, peningkatan belanja modal juga sekaligus meningkatkan pembangunan yang pada akhirnya dapat memperkuat perekonomian itu sendiri melalui peningkatan kesehatan, keterampilan, dan produktivitas masyarakat.

Selain belanja modal, struktur belanja pemerintah yang berupa belanja pegawai juga memiliki pengaruh terhadap pembangunan manusia. Belanja pegawai merupakan output belanja pemerintah yang memiliki nilai dan presentase yang besar dibanding jenis belanja pemerintah yang lain. Trend yang terjadi dewasa ini, pengeluaran belanja pegawai tiap daerah cenderung meningkat setiap tahunnya. Semakin tingginya jumlah belanja pegawai diharapkan berbanding lurus dengan tingkat kinerja yang dihasilkan pegawai. Pelayanan publik semakin baik dan tingkat korupsi semakin berkurang, yang kemudian akan menciptakan iklim investasi yang baik dan kondusif sehingga meningkatkan kegiatan perekonomian. Kemudian pada akhirnya akan meningkatkan pegawai tersebut dan juga kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

Selain hal-hal yang disebutkan diatas, Ginting, dkk (2008) juga menyatakan satu hal yang seringkali dikaitkan dengan pembangunan manusia adalah pertumbuhan ekonomi. Para ahli ekonomi telah sering mengamati sejauh mana hubungan dan pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pembangunan manusia. Demikian halnya dengan UNDP yang menyatakan bahwa hingga akhir tahun 1990-an, pembangunan manusia di Indonesia ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi atau PDB. Pertumbuhan PDB akan meningkatkan peluang masyarakat untuk dapat mengakses layanan pendidikan dan kesehatan yang lebih baik.

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yang digunakan adalah penggabungan dari data *time series* dari tahun 2007-2013 dan data *cross section* sebanyak 110 kabupaten/kota di Pulau Jawa. Pulau Jawa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah gabungan antara Pulau Jawa dan Madura, karena kabupaten/kota yang terdapat di Pulau Madura masih tergabung dalam wilayah Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini tidak menggunakan sampel di dalam objek penelitian. Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data *cross section* dari 110 kabupaten/kota di Pulau Jawa, sedangkan total kabupaten dan kota yang ada di Pulau Jawa yang berjumlah 114 kabupaten/kota.

Empat kabupaten/kota yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini yaitu Kota Serang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Pangandaran. Sedangkan Provinsi DKI Jakarta tidak memiliki kabupaten ataupun kota. Pembagian wilayah hanya berupa kota dan kabupaten administratif, sehingga data yang digunakan adalah APBD, pertumbuhan ekonomi, dan IPM tingkat Provinsi.

Metode Analisis Data Panel

Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini menggunakan teknik analisis yaitu regresi data panel dengan pendekatan *Fixed Effect Model* (FEM), dengan sebelumnya telah dilakukan uji pemilihan data panel terlebih dahulu dengan *Chow Test* dan *Hausman Test*. Kemudian pengujian hipotesis dalam penelitian ini berdasar dari evaluasi dari uji signifikasnsi parsial (uji-t) dan koefisien determinasi (R^2). Penelitian menggunakan program statistik EViews 8.1 dengan model fungsi yang digunakan adalah:

1. Model FEM Penelitian Pertama

Model penelitian yang pertama meneliti pengaruh variabel independen, yaitu Belanja Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap variabel dependen, yaitu Indeks Pembangunan Manusia.

$$IPM_{it} = \beta_1 + \beta_2 \ln BD_{it} + \beta_3 PE_{it} + \mu_{it}$$

2. Model FEM Penelitian Kedua

Model penelitian yang kedua meneliti pengaruh variabel independen, yaitu Belanja Modal dan Belanja Pegawai terhadap variabel dependen, yaitu Indeks Pembangunan Manusia.

$$IPM_{it} = \beta_1 + \beta_2 \ln BM_{it} + \beta_3 \ln BP_{it} + \mu_{it}$$

Keterangan:

IPM	= Indeks Pembangunan Manusia
BD	= belanja pemerintah daerah (ratusan juta rupiah)
PE	= pertumbuhan ekonomi (persen)
BM	= belanja modal (ratusan juta rupiah)
BP	= belanja pegawai (ratusan juta rupiah)
β_1	= konstanta
$\beta_2, \dots, \beta_3$	= koefisien
ln	= <i>logaritma natural</i>
i	= <i>cross section</i>
t	= <i>time series</i>
μ	= <i>error</i>

D. ANALISIS PEMBAHASAN

Model Penelitian Pertama

Estimasi yang dilakukan dengan *Fixed Effect* pada model pertama penelitian ini untuk mendapatkan hasil pengaruh variabel belanja daerah dan pertumbuhan ekonomi terhadap IPM dalam bentuk persamaan dengan hasil sebagai berikut:

$$IPM_{it} = 39,99661 + 3,426701 BD_{it} + 0,084008 PE_{it} + \mu_{it}$$

Berdasarkan Tabel 1 dan persamaan diatas dapat dilakukan beberapa hasil estimasi. Pada model pertama ini, variabel independen yang dimasukkan adalah belanja daerah dan pertumbuhan

ekonomi. Variabel belanja daerah dan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang positif terhadap variabel dependen, IPM. Nilai koefisien variabel belanja daerah adalah senilai 3,426701 dan nilai koefisien variabel pertumbuhan ekonomi adalah senilai 0,084008. Sedangkan konstanta pada model penelitian pertama ini yaitu sebesar 39,99661, hal ini menunjukkan bahwa apabila tidak ada pengaruh dari variabel belanja daerah dan pertumbuhan ekonomi (dianggap sama dengan nol), maka IPM diprediksikan tetap bernilai konstan sebesar 39,99661.

Tabel 1: Hasil FEM Model Pertama

	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	39.99661	0.447801	89.31790	0.0000
BD?	3.426701	0.051465	66.58332	0.0000
PE?	0.084008	0.019244	4.365322	0.0000

Sumber: Hasil estimasi EViews 8.1, diolah

Model Penelitian Kedua

Estimasi yang dilakukan dengan FEM pada model pertama penelitian ini untuk mendapatkan hasil pengaruh variabel belanja daerah dan pertumbuhan ekonomi terhadap IPM dalam bentuk persamaan dengan hasil sebagai berikut:

$$IPM_{it} = 44,19839 + 0,122320BM_{it} + 3,117784BP_{it} + \mu_{it}$$

Berdasarkan Tabel 2 dan persamaan diatas dapat dilakukan beberapa hasil estimasi. Pada model yang kedua ini, variabel independen yang dimasukkan adalah Belanja Modal dan Belanja Pegawai. Variabel belanja modal dan belanja pegawai memiliki pengaruh yang positif terhadap variabel dependen, IPM. Nilai koefisien variabel belanja modal adalah senilai 0,122320 dan nilai koefisien variabel belanja pegawai adalah senilai 3,117784. Sedangkan konstanta pada model penelitian kedua ini yaitu sebesar 44,19839, hal ini menunjukkan bahwa apabila tidak ada pengaruh dari variabel belanja modal dan belanja pegawai (dianggap sama dengan nol), maka IPM diprediksikan tetap bernilai konstan sebesar 44,19839.

Tabel 2: Hasil FEM Model Kedua

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	44.19839	0.342525	129.0370	0.0000
BM?	0.122320	0.032628	3.748909	0.0002
BP?	3.117784	0.040674	76.65364	0.0000

Sumber: Hasil estimasi EViews 8.1, diolah

Uji Hipotesis Penelitian

Tabel 3: Hasil Estimasi Regresi

Variabel	Koefisien	Signifikansi	Hubungan
Belanja Daerah	3,426701	Signifikan	Positif (+)
Belanja Modal	0,122320	Signifikan	Positif (+)
Belanja Pegawai	3,117784	Signifikan	Positif (+)
Pertumbuhan Ekonomi	0,084008	Signifikan	Positif (+)

Sumber: Hasil Estimasi EViews 8.1

1. Uji Hipotesis Belanja Daerah Terhadap IPM

Hipotesis yang diajukan terkait pengaruh Belanja Daerah terhadap IPM adalah sebagai berikut:

H_0 : Belanja Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM

H_1 : Belanja Daerah berpengaruh signifikan terhadap IPM

Berdasarkan estimasi *Fixed Effect Model* pada aplikasi EViews 8.1 diperoleh hasil bahwa t-statistic Belanja Daerah adalah sebesar 66,58332 dan probabilitas sebesar 0,0000. Dengan tingkat

kesalahan 5% ($\alpha = 0,05$), maka kesimpulan yang diambil adalah menolak H_0 karena $p\text{-value} < 0,05$. Hal ini berarti variabel Belanja Daerah berpengaruh signifikan terhadap IPM.

Pola hubungan Belanja Daerah adalah positif (+), menandakan bahwa Belanja Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap IPM dimana dengan asumsi variabel independen yang lain bernilai nol, setiap kenaikan 1 persen Belanja Daerah akan menyebabkan kenaikan IPM sebesar 3,426701.

2. Uji Hipotesis Belanja Modal Terhadap IPM

Hipotesis yang diajukan terkait pengaruh Belanja Daerah terhadap IPM adalah sebagai berikut:

H_0 : Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM

H_1 : Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap IPM

Berdasarkan estimasi *Fixed Effect Model* diperoleh hasil bahwa t-statistic Belanja Modal adalah sebesar 3,748909 dan probabilitas sebesar 0,0002. Dengan tingkat kesalahan 5% ($\alpha = 0,05$), maka kesimpulan yang diambil adalah menolak H_0 karena $p\text{-value} < 0,05$. Hal ini berarti variabel Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap IPM.

Kemudian pola hubungan Belanja Modal dalam model estimasi adalah positif (+), menandakan bahwa Belanja Modal berpengaruh positif signifikan terhadap IPM dimana dengan asumsi variabel independen yang lain bernilai nol, setiap kenaikan 1 persen Belanja Modal akan menyebabkan kenaikan IPM sebesar 0,122320.

3. Uji Hipotesis Belanja Pegawai Terhadap IPM

Hipotesis yang diajukan terkait pengaruh Belanja Pegawai terhadap IPM adalah: sebagai berikut:

H_0 : Belanja Pegawai tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM

H_1 : Belanja Pegawai berpengaruh signifikan terhadap IPM

Berdasarkan estimasi *Fixed Effect Model* diperoleh hasil bahwa t-statistic Belanja Pegawai adalah sebesar 76,65364 dan probabilitas sebesar 0,0000. Dengan tingkat kesalahan 5% ($\alpha = 0,05$), maka kesimpulan yang diambil adalah menolak H_0 karena $p\text{-value} < 0,05$. Hal ini berarti variabel Belanja Pegawai berpengaruh signifikan terhadap IPM.

Sedangkan pola hubungan Belanja Pegawai dalam model estimasi adalah positif (+), menandakan bahwa Belanja Pegawai berpengaruh positif signifikan terhadap IPM dimana dengan asumsi variabel independen yang lain bernilai nol, setiap kenaikan 1 persen Belanja Pegawai akan menyebabkan kenaikan IPM sebesar 3,117784.

4. Uji Hipotesis Pertumbuhan Ekonomi Terhadap IPM

Hipotesis yang diajukan terkait pengaruh Belanja Pegawai terhadap IPM adalah sebagai berikut:

H_0 : Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM

H_1 : Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh signifikan terhadap IPM

Berdasarkan estimasi *Fixed Effect Model* diperoleh hasil bahwa t-statistic Belanja Pegawai adalah sebesar 4,365322 dan probabilitas sebesar 0,0000. Dengan tingkat kesalahan 5% ($\alpha = 0,05$), maka kesimpulan yang diambil adalah menolak H_0 karena $p\text{-value} < 0,05$. Hal ini berarti variabel Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh signifikan terhadap IPM.

Pola hubungan Pertumbuhan Ekonomi dalam model estimasi adalah (+), menandakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap IPM dimana dengan asumsi variabel independen yang lain bernilai nol, setiap kenaikan 1 persen Pertumbuhan Ekonomi akan menyebabkan kenaikan IPM sebesar 0,084008.

5. Koefisien Determinasi (R^2)

R-squared (R^2) merupakan koefisien determinasi yang nilainya menunjukkan besarnya variasi dari variabel dependen yang bisa dijelaskan oleh model persamaan regresi, atau dengan kata lain R^2 menunjukkan kemampuan model persamaan regresi dalam menjelaskan variabel dependennya. Nilai R^2 berkisar antara nol sampai dengan satu ($0 < R^2 < 1$). Semakin mendekati angka satu maka nilai R^2 semakin baik. R^2 yang digunakan di dalam penelitian ini adalah koefisien determinasi dari model penelitian yang pertama, dimana model pertama merupakan model yang lebih mencakup keseluruhan penelitian ini. Berdasarkan estimasi *Fixed Effect Model* diketahui nilai *Adjusted R-squared* atau koefisien determinasi (R^2) bernilai 0,991070 (99,1%). Nilai tersebut berarti 99,1%

variasi IPM dapat dijelaskan oleh variasi variabel Belanja Daerah, Belanja, Modal, Belanja Pegawai, dan Pertumbuhan Ekonomi.

Pengaruh Belanja Daerah terhadap IPM

Variabel belanja daerah memiliki koefisien sebesar 3,426701 dan memiliki hubungan signifikan positif. Hasil tersebut menjelaskan bahwa Belanja Daerah memang memiliki dampak yang baik terhadap pembangunan manusia. Anggaran Belanja Daerah akan mempunyai peran riil dalam peningkatan kualitas layanan publik dan sekaligus menjadi stimulus bagi perekonomian daerah apabila terealisasi dengan baik. Dengan demikian, secara ideal seharusnya Belanja Daerah dapat menjadi komponen yang cukup berperan dalam peningkatan akses masyarakat terhadap sumber-sumber daya ekonomi yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

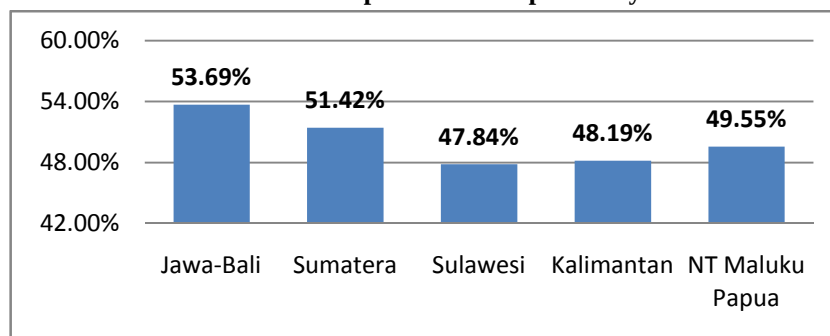
Peran Belanja Daerah terlihat dalam mengalokasikan dana yang diperoleh dari penerimaan pajak yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur/ prasarana (misalnya pembangunan jalan, bendungan, dan lainnya), penyediaan layanan umum seperti kesehatan dan pendidikan, serta dana hibah dan bantuan sosial kepada berbagai pihak. Pembangunan infrastruktur akan mempekerjakan banyak tenaga kerja, yang diberikan pendapatan sebagian dari padanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yang kemudian akan diikuti oleh kenaikan tingkat konsumsi. Peningkatan konsumsi masyarakat akan mendorong peningkatan produksi, dan dampak *multiple effect* ini akan semakin meningkat dan berkelanjutan, maka hasilnya dapat dilihat kemudian adalah pengangguran dapat diatasi, kemiskinan diturunkan, dan kesejahteraan masyarakat meningkat.

Pengaruh Belanja Pegawai terhadap IPM

Kemudian variabel yang memiliki hubungan signifikan positif selain belanja daerah dalam penelitian ini adalah variabel belanja pegawai memiliki koefisien sebesar 3,117784. Hubungan positif yang terjadi dapat diamati dari kesamaan tren yang dialami oleh variabel belanja pegawai dengan IPM. Dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2013 Belanja Pegawai dan IPM selalu memiliki tren positif setiap tahunnya. Hal ini membuktikan bahwa Belanja Pegawai memiliki pengaruh yang positif terhadap IPM. Padahal selama ini banyak pihak yang menyoroti dan mengkritisi mengenai jumlah Belanja Pegawai yang dinilai terlalu besar dalam APBD. Pihak yang mengkritisi tersebut berargumen bahwa hal ini mengakibatkan berkurangnya alokasi untuk Belanja Modal, yang dipandang lebih mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pemenuhan pelayanan publik.

Sebenarnya kedua hal ini dapat dikompromikan jika meninjau dari sisi kewajiban pemerintah daerah dalam peraturan perundangan bahwa Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dengan prioritas kepada pelaksanaan urusan daerah yang sifatnya wajib, salah satunya bidang pendidikan, maka sebenarnya belanja untuk gaji guru sebenarnya mendukung pencapaian tujuan tersebut. Upaya pemerintah untuk menambah rasio guru-murid untuk menambah kualitas pendidikan yang ada tentunya akan menambah beban dalam Belanja Pegawai. Pembebanan gaji guru tersebut bersifat wajib dalam rangka menjamin kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat dalam bidang pendidikan. Pembebanan gaji guru menjadi sangat penting karena guru adalah ujung tombak langsung dalam pemenuhan pelayanan dasar pendidikan.

Gambar 2: Rasio Guru Terhadap Total PNSD per Wilayah di Indonesia Tahun 2013



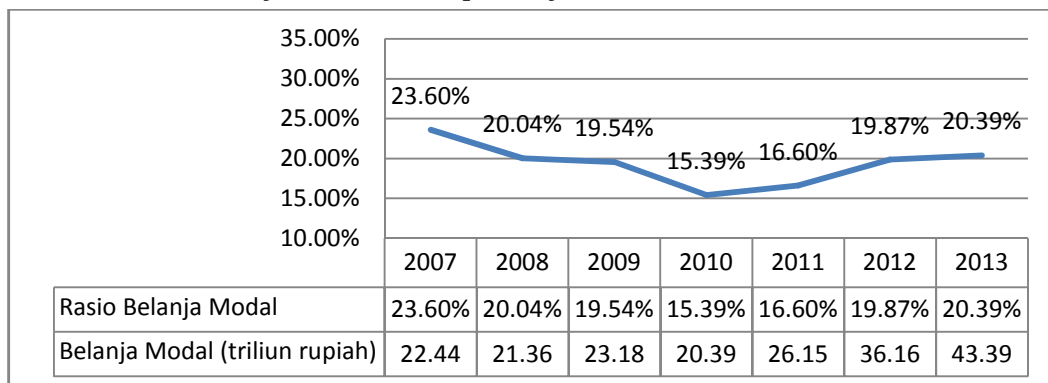
Sumber: Deskripsi dan Analisis APBD 2013, diolah

Pengaruh Belanja Modal terhadap IPM

Selanjutnya, variabel belanja modal memiliki hubungan signifikan positif dengan nilai koefisien sebesar 0,122320. Hal ini membuktikan bahwa Belanja Modal pada penelitian ini memiliki pengaruh yang positif terhadap IPM. Namun besaran koefisien tersebut jauh dibawah variabel belanja pegawai, padahal diantara struktur belanja APBD, belanja modal merupakan output yang dianggap paling dapat mempengaruhi pembangunan khususnya pembangunan manusia. Belanja modal yang memiliki sifat berupa aset tetap dan bermanfaat jangka panjang menjadikan belanja modal sebagai modal atau pondasi untuk meningkatkan pembangunan dalam sektor infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan kemampuan daya beli masyarakat. Terlebih dalam penelitian lain, Pramono (2012) malah mendapatkan hasil bahwa Belanja Modal berpengaruh negatif terhadap tingkat IPM. Pramono menyatakan ada kemungkinan Belanja Modal tersebut berpengaruh negatif, yaitu jumlah Belanja Modal dalam APBD yang terlalu kecil.

Salah satu penyebab rendahnya pengaruh antara Belanja Modal dan IPM diduga adalah terjadinya penurunan rasio Belanja Modal terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Jawa. Menurut analisis APBD yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan (2013), Penurunan cukup signifikan pada Belanja Modal pada tahun 2010 terjadi terutama karena sebagian besar daerah mengurangi belanja modal mereka secara signifikan (secara agregat nasional Kabupaten/Kota turun dari Rp88 triliun di tahun 2009 menjadi Rp69 triliun di tahun 2010). Penurunan ini terjadi akibat pengalihan belanja modal Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan ke Belanja Hibah DAK Pendidikan sebesar Rp9 triliun. Selain itu adanya Pilkada tahun 2010 juga berdampak terhadap rendahnya Belanja Modal tahun 2010. Pilkada yang bersumber dari Belanja Hibah APBD tentunya lebih menjadi prioritas utama daerah dibandingkan dengan Belanja Modal.

Gambar 3: Rasio Belanja Modal terhadap Belanja Daerah



Sumber: Ditjen Perimbangan Keuangan, 2014, diolah.

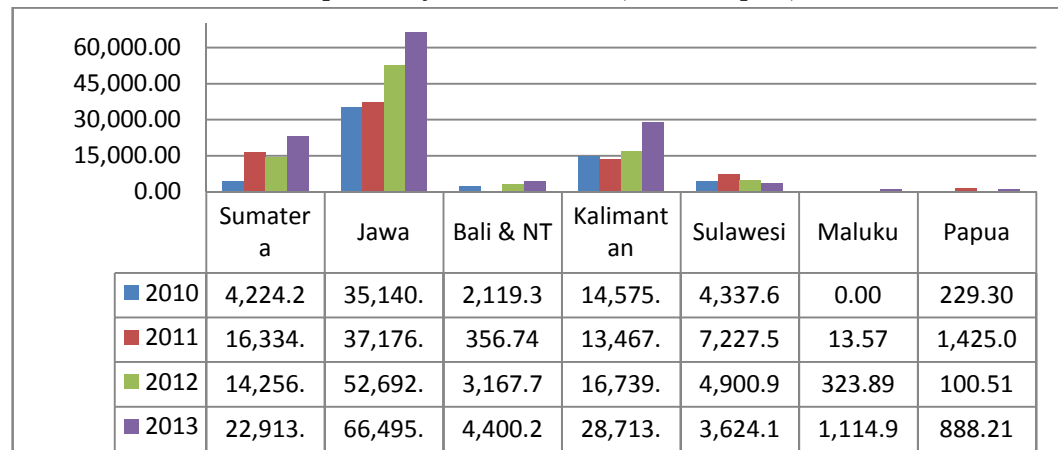
Di sisi lain, pemerintah daerah juga tidak dapat menurunkan Belanja Pegawai yang mereka keluarkan. Dengan semakin beratnya beban belanja pegawai (terutama gaji PNSD), maka kemampuan keuangan daerah pada dasarnya semakin turun. Dengan menggunakan indikator Ruang Fiskal (ketersediaan dana dalam APBD yang dapat digunakan secara bebas oleh daerah). Semakin besar dana yang masih bisa digunakan secara bebas oleh daerah ditunjukkan dengan Ruang Fiskal yang semakin besar. Tetapi tren ruang fiskal per wilayah secara persentase menunjukkan penurunan yang cukup signifikan diberbagai wilayah. Hal ini menunjukkan bahwa secara riil sebenarnya telah terjadi penurunan kemampuan daerah untuk mendanai kebutuhan daerah di seluruh wilayah. Sebagian besar daerah di wilayah Jawa-Bali memiliki ruang fiskal yang terbatas untuk melakukan belanja pemerintah dalam rangka pembangunan di daerahnya. Dengan ruang fiskal yang tersedia, diharapkan pemerintah daerah di wilayah Jawa-Bali dapat mengalokasikan belanjanya pada kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas daerah.

Selain itu, ada beberapa hal lain yang menjadi penyebab kurangnya porsi Belanja Modal untuk pembangunan manusia diantaranya alokasi Belanja Modal yang tidak mengarah pada program/kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan IPM, seperti infrastruktur publik, pendidikan, dan kesehatan. Belanja Modal kurang dimanfaatkan untuk aspek-aspek sosial maupun pembangunan manusia. Belanja Modal lebih banyak dihabiskan untuk membiayai kegiatan atau program pemerintah yang sifatnya administratif atau hanya penyelenggaraan pemerintahan seperti pengadaan atau pembangunan gedung baru, pengadaan kendaraan dinas, dan lain-lain. Terlebih lagi, kebutuhan akan infrastruktur publik di Pulau Jawa sebagian besar sudah cukup memadai,

sehingga alokasi Belanja Modal yang digunakan sedikit berbeda dengan Indonesia bagian timur yang sedang gencar membangun infrastruktur publik dengan dana Belanja Modal.

Terlebih, Pulau Jawa merupakan wilayah di Indonesia yang memiliki investasi sektor swasta yang tinggi. Dewasa ini pembangunan dan kesejahteraan bukanlah tugas pemerintah semata, namun juga sudah menjadi kebutuhan yang perlu diperjuangkan juga oleh semua pihak, termasuk sektor swasta. Sektor swasta juga memiliki peran yang penting baik sebagai agen kontrol terhadap pemerintah maupun sebagai pelengkap fungsi pemerintah yang tak mampu secara optimal menyediakan fasilitas publik yang menunjang kesejahteraan masyarakat. Peran sektor swasta dalam kesejahteraan lebih kepada upaya menyokong pemerintah dalam penyediaan sarana publik seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Selain itu, perusahaan dari sektor swasta juga meningkatkan perannya tersebut dengan mengeluarkan dana tanggung jawab sosial yang disebut dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang akan bermanfaat bagi pemberdayaan masyarakat.

Gambar 4: Realisasi PMDN per Wilayah di Indonesia (Miliar Rupiah)



Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal, 2014, diolah

Dari Gambar 4 dapat kita lihat bahwa realisasi PMDN di Pulau Jawa sangatlah tinggi jika dibanding wilayah lain di Indonesia. Pada tahun 2013 realisasi PMDN di Pulau Jawa mencapai 66,4 triliun rupiah, jauh melampaui saingan terdekat yaitu Kalimantan dengan 28,7 triliun rupiah. Hal ini membuktikan tingginya minat investor swasta terhadap geliat perekonomian di Pulau Jawa.

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap IPM

Selanjutnya untuk variabel pertumbuhan ekonomi, dalam penelitian ini didapatkan hasil koefisien sebesar 0,084008 dan memiliki hubungan signifikan positif. Hasil tersebut menjelaskan bahwa Pertumbuhan Ekonomi memiliki pengaruh positif terhadap pembangunan manusia. Hasil serupa juga didapatkan Lugastoro (2013), dalam penelitiannya variabel pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap IPM. Menurutnya, hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi dapat mempengaruhi peningkatan *output* Belanja Modal lebih besar secara keseluruhan, tidak hanya dari pengeluaran pemerintah namun juga investasi dari pihak swasta. Pertumbuhan Ekonomi akan membuat anggaran pendapatan yang diperoleh pemerintah meningkat yang diikuti dengan peningkatan Belanja Modal.

Besarnya PDRB Pulau Jawa yang mencapai 57% komposisi PDB Indonesia jelas menggambarkan produktivitas ekonomi yang tinggi. Dengan didukung oleh banyaknya aktivitas ekonomi khususnya sektor swasta yang ada, maka pendapatan yang diperoleh dari pajak akan tinggi. Tingginya penyerapan pajak akan menghasilkan PAD yang semakin besar yang kemudian dialokasikan ke dalam Belanja Daerah yang juga akan semakin besar. Belanja Daerah yang semakin besar, terutama jika dialokasikan pada pos belanja yang memiliki manfaat bagi publik seperti Belanja Modal ataupun Belanja Bantuan Sosial maka kesejahteraan masyarakat pun akan meningkat.

Indeks Pembangunan Manusia tidak hanya semata-mata membutuhkan pertumbuhan ekonomi untuk dapat tumbuh, namun pertumbuhan ekonomi tersebut juga harus diimbangi dengan pemerataan ekonomi yang baik, sehingga hasil dari pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia yang tinggi tersebut dapat dinikmati oleh semua penduduk. Laju pertumbuhan PDRB dan

IPM sebagai alat pengukur kesejahteraan seharusnya berjalan linear, pertumbuhan PDRB seharusnya disertai peningkatan pemerataan pendapatan dan alokasi pada aktivitas yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga nilai IPM akan meningkat.

E. KESIMPULAN

Kesimpulan

Belanja pemerintah daerah memiliki tren peningkatan setiap tahunnya, di sisi lain nilai Indeks Pembangunan Manusia juga terus meningkat. Penelitian ini ingin melihat apakah belanja pemerintah daerah memiliki pengaruh kepada peningkatan IPM yang terjadi. Dari hasil penelitian, Belanja Daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan Belanja Daerah akan diikuti oleh peningkatan Indeks Pembangunan Manusia kabupaten/kota di Pulau Jawa.

Kemudian Belanja Modal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Temuan ini sedikit berbeda dengan teori awal karena pada penelitian ini, Belanja Modal hanya memiliki pengaruh yang kecil. Diduga semakin kecilnya rasio Belanja Modal terhadap Belanja Daerah dan tingginya investasi sektor swasta menjadi penyebab variabel ini memiliki pengaruh yang relatif kecil terhadap IPM pada penelitian ini.

Selanjutnya Belanja Pegawai juga memiliki hasil yang serupa. Komposisi Belanja Pegawai yang saat ini banyak dikeluarkan untuk pembebanan guru PNSD menjadi salah satu faktor variabel ini memiliki pengaruh positif terhadap IPM. Pembebanan yang lebih besar kepada guru memberikan pelayanan pendidikan yang lebih baik.

Pertumbuhan Ekonomi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Hal ini berarti semakin tinggi Pertumbuhan Ekonomi yang terjadi maka akan dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia kabupaten/kota di Pulau Jawa. Meskipun begitu variabel ini memiliki pengaruh paling kecil dibandingkan dengan variabel independen yang lain, hal ini diduga disebabkan oleh pemerataan ekonomi yang masih rendah pada kabupaten/kota di Pulau Jawa, sehingga kurang menunjang pertumbuhan ekonomi yang terjadi.

Saran

Pemerintah daerah perlu memprioritaskan peningkatan terhadap sumber-sumber pendapatan daerah selain juga melakukan efisiensi belanja pemerintah daerah. Hal ini dapat dilakukan dengan lebih menggali potensi dan sumber daya daerah yang ada. Karena dengan Pendapatan Asli Daerah lebih yang besar pemerintah daerah bisa lebih mengalokasikan pengeluaran pada pos-pos yang menjadi prioritas.

Minimnya pengaruh Belanja Modal terhadap IPM dalam penelitian ini menunjukkan adanya kemungkinan pelaksanaan Belanja Modal yang kurang tepat sasaran. Oleh karena itu pemerintah semestinya dapat mengoptimalkan Belanja Modal pembangunan yang dapat berdampak positif terhadap masyarakat luas seperti pembangunan infrastruktur publik, bukan hanya terkuras untuk pengadaan modal internal pemerintah daerah saja. Sehingga nanti pada akhirnya Belanja Modal memiliki peran yang penting bagi kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah daerah diharap lebih memperhatikan distribusi pendapatan atau pemerataan ekonomi yang terjadi di daerah. Karena tanpa pemerataan ekonomi yang baik maka pertumbuhan ekonomi akan kurang berdampak pada pembangunan yang terjadi, baik pembangunan ekonomi maupun pembangunan manusia. Karena pada hakikatnya tujuan pembangunan adalah kesejahteraan yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Pemerintah pusat perlu mengkaji mengenai disparitas IPM antar daerah. Daerah-daerah yang masih kurang dalam pencapaian pembangunan manusia diharapkan agar lebih mendapat perhatian, salah satunya dengan memberikan prioritas dana perimbangan seperti Dana Alokasi Khusus agar dapat mencapai tingkat pembangunan manusia yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2013. *Teori-Teori Pembangunan Ekonomi: Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Wilayah*, Edisi 1. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Amaliah, Ima. 2006. Pengaruh Pembangunan Manusia Terhadap Kinerja Ekonomi Dati II di Jawa Barat, 1999-2003. *Mimbar*, Volume XXII No.2 April-Juni 2006: 213-233.

- Anggraini, Rinda A. & Luthfi Muta'ali. 2013. Pola Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Timur Tahun 2007-2011. *Jurnal Bumi Indonesia UGM*, Vol.2 No.3 Tahun 2013.
- Badan Pusat Statistik. 2014. *Indeks Pembangunan Manusia Provinsi dan Nasional 1996 – 2013*, (Online), (<http://www.bps.go.id>, diakses tanggal 8 Januari 2015).
- Badan Koordinasi Penanaman Modal. 2015. *Perkembangan Realisasi Investasi PMDN Berdasarkan Lokasi – Q4 2014*, (Online), (<http://bkpm.go.id>, diakses tanggal 18 Juni 2015).
- Badrudin, Rudy & Mufidhatul Khasanah. 2011. Pengaruh Pendapatan dan Belanja Daerah Terhadap Pembangunan Manusia di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *BULETIN EKONOMI, Jurnal Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi Pembangunan*, Vol.9 No.1, April 2011: 23-30.
- Cholili, Fatkhul M. 2014. *Analisis Pengaruh Pengangguran, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Jumlah Penduduk Miskin (Studi Kasus 33 Provinsi di Indonesia)*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
- Darmayasa, I Nyoman & I Ketut Suandi. 2014. Faktor Penentu Alokasi Belanja Modal dalam APBD Pemerintah Provinsi. *Simposium Nasional Akuntansi 17, Lombok, Universitas Mataram 24-27 September 2014*.
- Despotis, D.K. 2005. Measuring Human Development via Data Envelopment Analysis: the case of Asia and the Pasific. *Omega, International Journal of Management Science* 33 (2005) 385-390.
- Direktorat Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah. 2010. *Dekripsi dan Analisis APBD 2010*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- Direktorat Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah. 2013. *Dekripsi dan Analisis APBD 2013*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- Faqihuddin, M. 2010. Human Developmnet Index (HDI) Salah Satu Indikator yang Populer Untuk Mengukur Kinerja Pembangunan Manusia. *CERMIN No.047, September 2010*.
- Fukuda-Parr, Sakiko, *et al.* 2013. How Should MDG Success and Failure be Judged: Faster Progress or Achieving the Targets?. *World Development Vol. 41, pp. 19-30, 2013*.
- Ginting, Charisma K, dkk. 2008. Pembangunan Manusia di Indonesia dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya. *WAHANA HIJAU, Jurnal Perencanaan & Pengembangan Wilayah Vol.4, No.1, Agustus 2008*.
- Girsang, Beryl A. & Tukiran. 2012. *Alokasi Anggaran Daerah Dalam Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara 2001-2009*. Universitas Gadjah Mada.
- Grimm, Michael, *et al.* 2008. A Human Development Index by Income Groups. *World Development vol.36 No.12, pp. 2257-2546 (2008)*.
- Gujarati, Damodar N. & Dawn C. Porter. 2012. *Dasar-dasar Ekonometrika, Buku 2 Edisi 5*. Terjemahan oleh R. Carlos Mangunsong. 2012. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Hendarmin. 2012. Pengaruh Belanja Modal Pemerintah Daerah dan Investasi Swasta terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kesempatan Kerja, dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal EKSOS, Vol.8 No.3, Oktober 2012, hal 144-155*.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. *Data Pokok APBN 2007-2013*.
- Kuncoro, Mudrajad. 1997. *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan; Cetakan Pertama*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Lugastoro, Decta P & Candra Fajri A. 2013. *Analisis Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Jawa Timur*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
- Mangkoesebroto, Guritno. 1999. *Ekonomi Publik*, Yogyakarta: BPFE.
- Maryani, Tri. 2010. *Analisis Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah*. Fakultas Ekonomi UPN Yogyakarta.

- Pramono, Pungkas A. 2012. *Pengaruh Kemampuan Keuangan Daerah, Belanja Pemerintah, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat IPM Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
- Prasetya, Ferry. 2012a. *Modul Ekonomi Publik Bagian IV: Teori Barang Publik*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
- Prasetya, Ferry. 2012b. *Modul Ekonomi Publik Bagian V: Teori Pengeluaran Pemerintah*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
- Prasetyo, Ahmad D. & Ubaidillah Zuhdi. 2013. The Government Expenditure Efficiency toward the Human Development. *Procedia Economics and Finance* 5 (2013) 615-622.
- Pratowo, Irsa N. 2011. Analisis Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *Jurnal Studi Ekonomi Indonesia*, Vol.1 No.1, September 2011.
- Santika Dewi, Nyoman L & I Ketut Sutrisna. Pengaruh Komponen IPM Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana* Vol.3, No.3, Maret 2014.
- Sasana, Hadi. 2012. Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah dan Pendapatan Perkapita Terhadap IPM (Studi Kasus di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah). *Media Ekonomi dan Manajemen*, Vol 25 No.1 Januari 2012.
- Setyowati, Lilis & Yohana Kus S. 2012. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, DAU, DAK, PAD Terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening. *Prestasi* Vol.9 No.1 Juni 2012.
- Soepangat, Edi & Haposan Lumban G. 1991. *Pengantar Ilmu Keuangan Daerah*. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sukirno, Sadono. 1985. *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan*. Jakarta: Lembaga Penerbit FE Universitas Indonesia.
- Sumiyati, Euis E. 2011. Pengaruh Belanja Modal Terhadap Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Barat. *JIPOLIS, Jurnal Ilmu Politik & Ilmu Sosial* Vol.7 No.1, Januari 2011.
- Todaro, Michael P & Stephen C. Smith. 2006. *Pembangunan Ekonomi, Jidlid 1 Edisi Kesembilan*. Terjemahan oleh Aris Munandar. 2006. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- United Nations Development Programme. 1990. *Human Development Report 1990*. New York: Oxford University Press.